

Judul : Harga BBM Subsidi dijamin tak naik sampai akhir tahun
Tanggal : Minggu, 10 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Harga BBM Subsidi Dijamin Tak Naik Sampai Akhir Tahun

Di tengah lonjakan harga minyak dunia, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tetap dipertahankan oleh Pemerintah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia menjamin, harga BBM subsidi takkan naik sampai akhir tahun.

Bahilil menegaskan, kebijakan harga BBM subsidi tidak berubah. Yang naik hanya harga BBM non-subsidi, yang disesuaikan dengan perkembangan pasar. Bahilil pun meminta masyarakat pengguna BBM subsidi tidak perlu khawatir.

Pemerintah akan tetap menjaga stabilitas harga BBM subsidi.

"Sekali lagi saya katakan bahwa untuk miak subsidi, baik bensin maupun solar, juga LPG, tidak akan ada kenaikan. Saya katakan tidak akan ada kenaikan," kata Bahilil, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Di lapangan, harga BBM non-subsidi menunjukkan tren peningkatan. Harga Pertamina Dex misalnya, mencapai Rp 27.900 per liter. Di SPBU swasta, harga BBM non-subsidi lebih mahal lagi. Untuk

solar, mencapai Rp 30.000 per liter. Kenaikan ini mengikuti kondisi pasar energi global.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, keputusan Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan keputusan politik yang sangat strategis.

Menurutnya, keputusan yang diambil Pemerintah semata-mata dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

"Ada dua aspek, yakni aspek ekonomi dan aspek politik," ujar

politisi Partai Golkar ini, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (7/5/2026).

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda sependapat dengan langkah Pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan dampak terhadap perekonomian nasional.

"Jika harga BBM bersubsidi meningkat, maka dampak terhadap inflasinya cukup tinggi," ungkap Nailul Huda kepada Rakyat Merdeka, Kamis (7/5/2026).

Ia pun menyarankan Pemerintah agar mempertal anggaran subsidi BBM. Ia khawatir APBN tidak mampu menopang subsidi BBM hingga akhir tahun.

"Agar APBN tidak goyah, maka perlu refocusing anggaran untuk mempertal anggaran untuk BBM," tambahnya.

Untuk mengetahui pandangan Mukhamad Misbakhun dan Nailul Huda mengenai jaminan Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi, berikut wawancara lengkapnya:

MUKHAMAD MISBAKHUN, Ketua Komisi XI DPR

Untuk Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi



“Melindungi dari gejala sosial dan politik. Sebab, kenaikan harga BBM subsidi bisa memicu terjadinya hal-hal yang kurang baik dan dapat mengganggu stabilitas politik nasional.”

Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Bagaimana pandangan Anda?

Dari aspek ekonomi, ini untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok rentan dari kenaikan harga. Apabila mereka terpapar kenaikan harga BBM bersubsidi, maka akan memberikan tekanan terhadap inflasi. Sebab, harga BBM menjadi salah satu *administered price inflation*. Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, maka harga logistik akan naik, biaya produksi akan naik, dan itu akan memberikan tekanan terhadap harga-harga hampir semua kebutuhan masyarakat.

Dampaknya akan seperti apa?

Ini akan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, langkah ini dilakukan Pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tersebut. Ini terbukti karena kita berada dalam pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan di antara negara-negara lain di dunia, terutama di G20.

Kalau dari aspek politik?

Dalam keadaan geopolitik yang serba tidak menentu dan itu global yang terus memberikan tekanan, maka dari aspek politik, kita bisa memberikan bantalan kepada masyarakat bahwa Pemerintah terus memberikan perlindungan kepada mereka.

Perlindungan apa?

Melindungi dari gejala sosial dan politik. Sebab, kenaikan harga BBM subsidi bisa memicu terjadinya hal-hal yang kurang baik dan dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Namun, bagaimana dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan diberlakukan kebijakan ini?

Tekanan dari pemberian subsidi BBM ini masih bisa dioperasikan APBN kita. Sebab, mekanisme subsidi BBM sudah sejak awal dialokasikan belanjanya di APBN. Artinya, hal ini memiliki korekuensi bahwa Pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran.

Alokasi anggarannya dari mana saja?

Dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan kepelautan, dan penerimaan cukai. Tentunya, kami berharap dalam situasi geopolitik saat ini, penerimaan pajak kita harus bisa optimal sesuai target yang ada di APBN. Inilah yang harus dipastikan supaya langkah Pemerintah menjaga harga BBM subsidi tidak naik, dengan asumsi harga rata-rata minyak global maksimal 100 dolar Amerika Serikat per barel, bisa dimaksimalkan sampai akhir tahun. Sebab, komponen lainnya seperti minyak akan mengalami tekanan dari produksi dalam negeri yang masih terbatas dan kita masih banyak melakukan impor.

Lalu, apa dampak lainnya dari kebijakan ini?

Ada juga dari nilai tukar rupiah. Menurut saya, nilai tukar saat ini yang harus dijaga. Jangan sampai *range* terlalu jauh dari target yang ada di APBN sebesar Rp 16.500. Kalau *range* ini terlalu besar, akan asumsi di APBN dan realitas impor, inilah yang bisa memberikan tekanan terhadap harga. ■ NNM

NAILUL HUDA, Direktur Ekonomi Digital Celios

Kebijakan Ini Bisa Cegah Kenaikan Inflasi



“Jika harga BBM bersubsidi meningkat, maka dampak terhadap inflasinya cukup tinggi. Saat ini BBM non-subsidi sudah dinaikkan.”

Hingga saat ini Pemerintah terus berusaha agar harga BBM subsidi tidak naik. Apa pandangan Anda?

Di tengah kondisi daya beli dan industri yang sedang tidak baik-baik saja, memang kami juga menyarankan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.

Apa dampaknya jika harga BBM bersubsidi dinaikkan?

Jika harga BBM bersubsidi meningkat, maka dampak terhadap inflasinya cukup tinggi. Saat ini BBM non-subsidi sudah dinaikkan.

Apakah itu tidak berpengaruh pada inflasi?

Untuk BBM non-subsidi, meskipun ada pengaruh terhadap inflasi, saya rasa pengaruhnya terbatas.

Lantas, apa dampak jangka pendek dan panjang dari kebijakan Pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi?

Memang dalam jangka pendek,

subsidi untuk BBM harus dipertal. Namun, salah satu kendalanya adalah ketersediaan dana di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ada kendala di APBN atau bagaimana?

Dana yang saat ini tersedia mungkin tidak cukup untuk satu tahun anggaran ketika harga minyak mentah dunia rata-rata mencapai 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.

Memang asumsi harga per barel pada APBN berapa?

Karena asumsi APBN hanya 70 dolar AS per barel. Tambahan subsidi akan sangat besar.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah agar kebijakan ini bisa berjalan baik selama kondisi global belum stabil?

Agar APBN tidak goyah, maka perlu dilakukan refocusing anggaran untuk mempertal anggaran subsidi BBM.

Dari mana anggaran yang perlu dilakukan refocusing?

Salah satu yang kami sarankan adalah dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana dari MBG sangat besar dan bisa dialihkan.

Selain dari MBG, anggaran apa lagi yang bisa dilakukan refocusing?

Menurut saya, anggaran dari MBG sangat dimungkinkan atau dari proyek infrastruktur. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mempertal biaya subsidi BBM.

Apakah pendapatan pajak dan lainnya jika dimaksimalkan hingga akhir tahun tidak mencukupi untuk mendanai subsidi BBM?

Pajak itu saya rasa sangat penting. Kita punya potensi pajak yang sangat besar. Sementara belanja negara naik dua digit. Jadi, seperti yang saya katakan, saya tidak akan cukup. Karena itu, tetap dibutuhkan refocusing anggaran. ■ NNM